

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

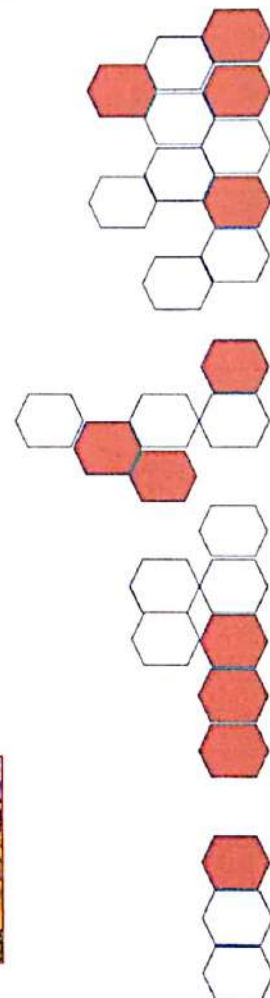
TAHUN 2021



LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020



Product By : Bid Sekretariat, Bag.
Perencanaan Program

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2020. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor Tahun 53 Tahun 2014.

Painan, Maret 2020

Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 telah selesai disusun..

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2020

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel. 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik	%	29.90	29.55	98.83
		2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi baik	%	45.66	42	91.98
2.	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan dasar	1. Persentase Penduduk berakses air minum / bersih	%	96.16	95.59	99.41
		2. Persentase akses sanitasi layak	%	75.16	75.27	100.15
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang telah di tetapkan	%	25	12.5	50
		2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	%	66.14	66.14	100
4.	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan public	Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	Unit	20	10	50
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai	A (90)	*	*

- Hasil Penilaian AKIP tahun 2020 belum ada dari Inspektorat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Kepegawaian
- 1.7 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

- Lampiran :**
- I. Perjanjian Kinerja Eselon II
 - III. Prestasi-Prestasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu Dinas menyusun rencana program dan kegiatan, baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan dana yang tersedia.

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu dinas penyelenggara urusan wajib yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 144.106.146.277,00- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.275.338.804,00- dan belanja langsung sebesar Rp. 138.830.807.473,00 - untuk mengelola sebanyak 20 Program dan 85 kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah. Bahan LKjIP ini selanjutnya menjadi masukan bagi Pemda dalam menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada

masyarakat terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja (kinerja) dinas pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

masyarakat terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja (kinerja) dinas pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago – Salido, Kecamatan IV Jurai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan, pada tingkat kabupaten sesuai perundang undangan.

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, Kementerian atau Departemen disertai tugas untuk menangani masalah perencanaan pembangunan infrastruktur menuju daerah – daerah terpencil dengan memperhatikan aksesibilitas daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP/150/A/KPTS/1966, maka pada tanggal 3 desember 1966 di tetapkan sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Sekretariat, terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi
- b. Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
 - 1. Seksi Penataan Ruang
 - 2. Seksi Pertamanan
 - 3. Seksi Kebersihan
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari
 1. Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan melalui Peraturan bupati nomor 54 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan menetapkan seluruh urusan dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- b. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dan pelayanan umum dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran dinas ;
- c. mengkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan dinas;
- d. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- e. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas sesuai dengan ketentuan;
- f. merumuskan sasaran penyusunan rencana strategi dinas;
- g. mengkoorganisasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta Kegiatan Operasional Dinas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Organisasi;
- i. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- j. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- k. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;

- l. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dinas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m. membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawab dinas;
- n. merumuskan sasaran dan alternatif kebijakan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional pada urusan masing-masing seksi di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, serta UPTD Laboratorium;
- p. mengendalikan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan serta UPTD Laboratorium, untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- q. mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- r. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- s. mengatur, memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan menetapkan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- t. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada kepala daerah; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala daerah.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan dinas serta melaksanakan urusan jasa konstruksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan dinas;
2. pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran serta pelaporan dinas;
3. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan;
4. penyelenggaraan urusan jasa konstruksi.
5. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
6. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
7. penataan organisasi dan tata laksana; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat kepada kepala dinas;
- d. melaksanakan koordinasi sasaran penyusunan rencana strategi dinas, serta koordinasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan operasional dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas;
- f. melaksanakan pengkoordinasian dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak (LP2P) Pribadi di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan pengkoordinasian, mengarahkan dan mengatur penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati serta laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke kepala dinas;
- h. melaksanakan pengkoordinasian laporan daftar hadir pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

- i. mengkoordinasi, menyelia, dan mengarahkan tugas-tugas sekretariat kepada bawahan yang mengurus umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta urusan pembinaan jasa konstruksi.;
- j. melaksanakan penataan naskah dinas, persuratan dan dokumen lainnya serta pengarsipan dan pemustakaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan merencanakan pengadaan barang/jasa kebutuhan dinas;
- l. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- m. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi serta mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas;
- n. memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan identifikasi permasalahan
- p. serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala dinas;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat;
- r. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- s. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- t. menyelenggarakan tertib administrasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- u. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Untuk menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan,

drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina marga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina marga mempunyai uraian tugas :

- a. membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
- c. menyusun konsep sasaran kegiatan bidang bina marga;
- d. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang bina marga;
- e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategi bidang bina marga;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang bina marga;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan laporan kinerja bidang bina marga kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional pada bidang bina marga, yang meliputi urusan perencanaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan perencanaan jalan dan jembatan;
- j. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pembangunan jalan dan jembatan;
- k. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang bina marga;

- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data dan penyampaian laporan bidang bina marga;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- o. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga;
- p. mengkoordinasikan, mengevaluasi pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- q. mengkoordinasikan, mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan bina marga;
- s. membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan bina marga; dan
- t. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh dinas.

BIDANG TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas urusan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang tata ruang dan kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- f. mengelola evaluasi bidang tata ruang dan kebersihan;
- g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- i. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang tata ruang dan kebersihan;
- j. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang tata ruang dan kebersihan dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- k. menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang tata ruang dan kebersihan;
- l. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakarya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;

- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas penyelenggaraan dan penyediaan infrastruktur air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang cipta karya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;
- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan tata ruang, tata bangunan, dan jasa konstruksi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- g. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup keciptakaryaan;
- i. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM PENGUJIAN KONTRUKSI

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas memimpin Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam

Pelaksanaan Jasa Pengujian Mutu Bahan meliputi Pengujian Tanah, Beton, Aspal dan Bahan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan , Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan laboratorium Pengujian konstruksi
- b. Penyusunan program kerja
- c. Penyiapan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Laboratorium
- d. Pelayanan jasa pengujian
- e. Pemungutan retribusi
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 Kepegawaian

Dalam melaksanakan pekerjaan , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember Tahun 2020 di laksanakan oleh 60 (Enam Puluh) orang pegawai negeri sipil terdiri dari 42 orang laki – laki atau 70 % laki – laki dan 18 orang perempuan atau 30 % perempuan

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki – laki	42 Orang	70 %
Perempuan	18 Orang	30 %
Jumlah	60 Orang	100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan , SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh jenjang pendidikan S1

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan
Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	8	13,33 %
2	D4/S1	28	46,67 %
3	D3	6	10 %
4	SLTA	18	30 %
	Jumlah	60 Orang	100%

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2020 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan penetapan kinerja untuk tahun 2020
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN 2016-2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Dari kelima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah dengan tujuan yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah. Dari tujuan dan Misi kedua Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera</i>			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan persentase jembatan kondisi baik

		2. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	1. Persentase penduduk berakses air minum/bersih
		3. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	2. Persentase Akses Sanitasi Layak
			1. Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan
	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel dan berkinerja yang didukung dengan bangunan pelayanan public yang berkualitas	1. Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau
		2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik
			1. Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Begitupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga telah membuat rencana kinerja seperti terlampir.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik	29.90%
		Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	45.66%
2	Meningkatnya infarastruktur pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum / bersih dan persentase akses sanitasi layak	96.16% dan 75.16%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1. Persentase Dokumen dan Regulasi tata ruang yang telah di tetapkan	25%
		2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	66.14%
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	20 Unit
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	A

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data Penanggung Jawab
(1)	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik Persentase Jembatan Kabupaten kondisi baik	$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga
2.	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum/bersih Persentase akses Sanitasi Layak	$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan 2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Tata Ruang yang diperda / diperbupkan}}{\text{jumlah dokumen tata ruang}} \times 100\%$ $\frac{\text{Luas RTH yang tersedia}}{\text{Luas RTH Publik Yang Seharusnya}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
4	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasana pelayanan public	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik.	Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / dipelihara pertahun selama 5 tahun	Bidang Cipta Karya
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian AKIP Dinas Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUTR

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2020. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 3.2

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH							
Tujuan :							
1. Meningkatkan Penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar .							
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja yang didukung dengan Bangunan Pelayanan Publik yang berkualitas							
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	%	29.90	29.55	98.83
		2.	Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi baik	%	45.66	42	91.98
2.	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan dasar	1.	Persentase Penduduk berakses air minum / bersih	%	96.16	95.59	99.41
		2.	Persentase akses sanitasi layak	%	75.16	75.27	100.15
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1.	Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang telah di tetapkan	%	25	12.5	50
		2.	Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	%	66.14	66.14	100
4.	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan public		Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	Unit	20	10	50
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai	A (90)	*	*

- Hasil Penilaian AKIP tahun 2020 belum ada dari Inspektorat

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan Jembatan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni:

- a. Persentase jalan kabupaten kondisi baik
- b. Persentase jembatan kabupaten kondisi baik

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jalan kabupaten kondisi baik	%	29.90	29.55	98.83
2	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	%	45.66	42	91.98

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Persentase jalan Kabupaten kondisi baik merupakan indicator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan . Dengan panjang jalan Kabupaten sepanjang 2333.18 Km, di targetkan pada akhir tahun 2020 persentase jalan kondisi baik dapat menjadi 29.90 %. Dengan realisasi 29.55 % dan pencapaian atas target sebesar 98.83% tersebut maka klarifikasi penilaian untuk jalan kondisi baik adalah sangat baik. Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah panjang jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati Tahun 2015 adalah 2.333, 18 Km .

Tabel 3.4

REKAPITULASI
DAFTAR JALAN JARINGAN INDUK KABUPATEN
MENURUT JENIS PERMUKAAN DAN KONDISI
TAHUN 2020

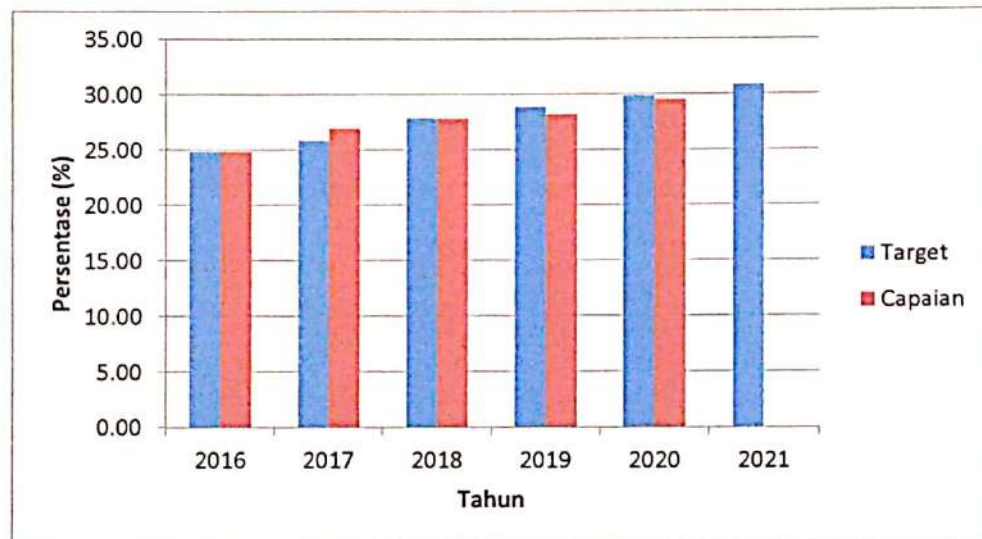
No	Kecamatan	Panjang Jalan Menurut Permukaan						Panjang Jalan (Km)	Panjang Jalan Menurut Kondisi						Panjang Jalan (Km)			
		Aspal		Kerikil		Tanah			Beton		Baik		Sedang			Rusak		
		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%		(Km)	%	
1	KOTO XI TARUSAN	47.40	36.49%	10.03	7.72%	33.37	25.69%	39.10	30.10%	63.40	48.81%	21.10	16.24%	6.93	5.33%	38.47	29.62%	129.90
2	BAYANG	70.35	55.48%	11.90	9.38%	16.20	12.78%	28.35	22.36%	81.32	64.13%	19.68	15.52%	1.40	1.10%	24.40	19.24%	126.80
3	BAYANG UTARA	5.90	14.75%	3.90	9.75%	15.00	37.50%	13.20	38.00%	40.00	40.00	9.35	23.38%	0.25	0.63%	24.70	61.75%	40.00
4	IV JURAI	86.49	57.37%	7.62	5.05%	40.18	26.65%	16.46	10.92%	150.75	57.42%	10.56	7.00%	5.83	3.87%	47.80	31.71%	150.75
5	BATANG KAPAS	43.91	39.95%	32.84	29.88%	10.90	9.92%	22.25	20.25%	109.90	38.41%	15.85	14.42%	8.10	7.37%	43.74	39.80%	109.90
6	SUTERA	63.00	31.16%	82.00	40.55%	46.90	23.19%	10.30	5.09%	202.20	30.59%	24.05	11.89%	20.70	10.24%	95.60	47.28%	202.20
7	LENGAYANG	94.28	35.69%	71.98	27.25%	63.35	23.98%	34.54	13.08%	264.15	39.19%	21.86	8.28%	37.77	14.30%	101.00	38.24%	264.15
8	RANAH PESISIR	61.85	41.07%	52.20	34.66%	13.25	8.80%	23.30	15.47%	150.60	39.08%	25.45	16.90%	21.40	14.21%	44.90	29.81%	150.60
9	LINGGO SARI BAGANTI	85.50	39.31%	65.37	30.06%	61.70	28.37%	4.93	2.27%	217.50	35.55%	14.45	6.64%	50.72	23.32%	75.00	34.48%	217.50
10	AIRPURA	25.78	16.61%	80.09	51.60%	45.40	29.25%	3.93	2.53%	155.20	14.68%	14.10	9.09%	40.53	26.11%	77.79	50.12%	155.20
11	PANCUNG SOAL	10.76	9.93%	50.17	46.29%	38.15	35.20%	9.30	8.58%	108.38	10.48%	7.20	6.64%	33.40	30.82%	56.42	52.06%	108.38
12	BASA AMPEK BALAI	11.00	16.18%	35.35	51.99%	16.50	24.26%	5.15	7.57%	68.00	12.50%	8.65	12.72%	6.80	10.00%	44.05	64.78%	68.00
13	RANAH IV HULU TAPAN	4.45	7.70%	11.75	20.33%	35.80	61.94%	5.90	10.03%	57.80	10.64%	2.15	3.72%	9.85	17.04%	39.65	68.60%	57.80
14	LUNANG	29.75	9.50%	100.85	32.22%	179.80	57.44%	2.60	0.83%	313.00	8.37%	19.75	6.31%	77.75	24.84%	189.30	61.48%	313.00
15	SILAUT	39.69	16.61%	105.96	44.33%	90.00	37.66%	3.35	1.40%	239.00	14.12%	38.08	15.93%	61.42	25.70%	105.76	44.25%	239.00
	TOTAL	680.11	29.15%	722.01	30.95%	706.50	30.28%	224.56	9.62%	2333.18	29.55%	252.28	10.81%	382.85	16.41%	1008.58	43.23%	2333.18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Jalan Kabupaten Kondisi Baik.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian SetiapTahun (%)	24.90	25.90	27.90	28.90	29.90	30.90
2	Realisasi (%)	24.90	27.00	27.87	28.23	29.55	



Gambar 3.1
Target dan realisasi per tahun Jalan Kondisi baik menurut Renstra 2016 -2021

Capaian indikator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$$

Capaian Indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2020 dan pemutakhiran data base jalan. Pemutakhiran data base jalan dilakukan pada bulan desember . Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan pembangunan, peningkatan kuantitas dan pemeliharaan jalan. Data Kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, Sedang , Rusak dan Rusak Berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi

mantap. Hasil Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung indicator persentase jalan dalam kondisi baik seperti pada gambar berikut :



Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Tarusan – Sei. Tawar Kec. Koto XI Tarusan Tahun 2020

Definisi operasional ke- PU-an tentang jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di bagi panjang seluruh jalan kabupaten di Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah :

$$= \frac{689.47}{2333.18} \times 100\% = 29.55 \%$$

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016 s/d 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	24.90	27.08	27.87	28.23	29.55	100.00	104.25	99.89	97.68	98.83

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.7 Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Jenis Kondisi dan Permukaan Jalan	Status Jalan								
		Jalan Kabupaten								
		2012 Km	2013 Km	2014 Km	2015 Km	2016 Km	2017 Km	2018 Km	2019 Km	2020 Km
A	Jenis Permukaan									
	1 Aspal	728.35	748.65	755.37	691.19	726.88	739.81	749.79	761.35	680.11
	2 Kerikil	502.29	483.79	492.66	625.52	670.03	637.60	631.34	622.83	722.01
	3 Beton	397.07	397.17	395.23	193.25	202.37	231.90	234.13	717.62	224.56
	4 Tanah	695.78	693.88	680.30	823.22	733.90	723.87	717.92	231.38	706.50
	Jumlah	2323.49	2323.49	2323.56	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18
B	Kondisi Jalan									
	1 Baik	857.73	866.41	931.14	798.49	580.87	630.01	650.18	658.64	689.47
	2 Sedang	704.03	704.1	653.34	202.02	262.61	246.48	250.61	258.34	252.28
	3 Rusak	368.35	363.85	357.88	653.57	641.46	558.11	548.23	559	382.85
	4 Rusak Berat	393.38	389.13	381.13	679.10	848.25	898.58	884.16	857.21	1008.58
	Jumlah	2323.49	2323.49	2,323.49	2,333.18	2,333.18	2,333.18	2,333.18	2333.18	2333.18
C	Panjang Jalan									
	1 Kelas I									
	2 Kelas Jalan II									
	3 Kelas Jalan III	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90
	4 Kelas Jalan III A	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50
	5 Kelas Jalan III B	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26
	6 Kelas Jalan III C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Kelas Tidak Rinci	1300.83	1300.83	1300.83	1310.52	1310.52	1310.52	1310.52	1310.52	1310.52
	Jumlah	2323.49	2323.49	2323.49	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18

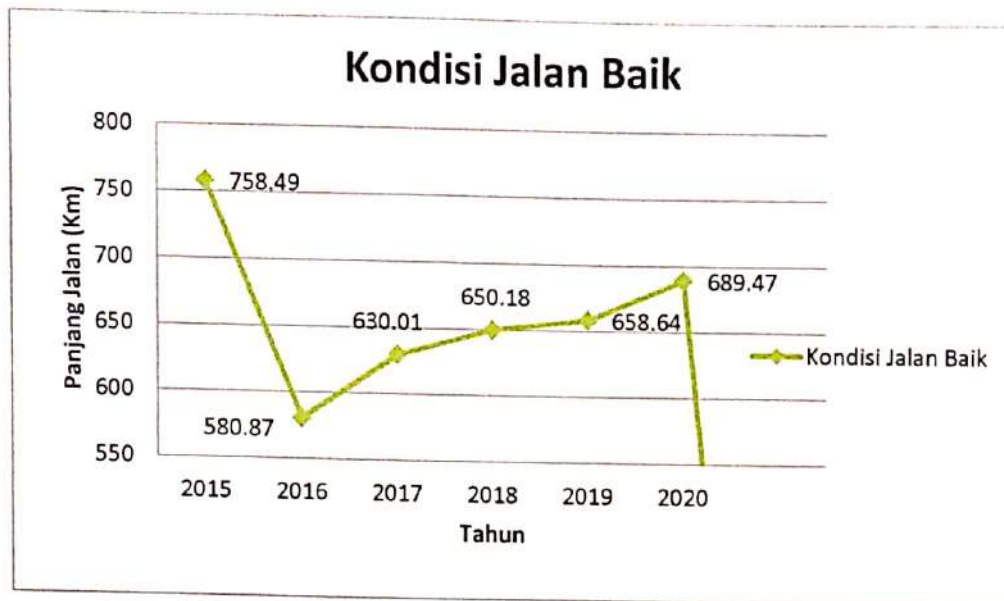
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan sepanjang 30.83 km pada tahun 2020.

Begitu juga dengan jenis permukaan jalan aspal mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sepanjang 81.24 km.

Tabel 3.8
Kenaikan Panjang jalan kabupaten kondisi baik tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	Tahun					2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Panjang Jalan kabupaten kondisi baik (Km)	758,49	580,87	630,01	650.18	658.64	689.47



Gambar 3. 2 Grafik Kenaikan Panjang jalan kondisi baik tahun 2015 s/d 2020

Adapun kondisi kemantapan jalan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.9 KONDISI KEMANTAPAN RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2020

NO NO RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	013.018 INDRAPURA - MUJARA SAKAI	7.300	3.600	49.315	3.300	45,205	0.200	2.740	0.200	2.740	6.900	94.521	0.400	5.749
2	06.073 PASAR BARU – ALAHAN PANJANG	49.400	4.200	8.502	24.855	50.314	8.373	16.949	11.972	24.235	29.055	58.816	20.345	41.184
3	06.083 TELUK KABUNG - MANDEH – TARUSAN	44.100	17.800	40.363	25.900	58.730	0.400	0.907	0.000	0.000	43.700	99.093	0.400	0.907
4	06.086 SURANTIAH - KAYU ARO – LANGGAI	27.700	0.600	2.166	16.100	58.123	0.600	2.166	10.400	37.545	16.700	60.289	11.000	39.711
5	06.100 BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1.200	0.300	25.000	0.750	62.500	0.150	12.500	0.000	0.000	1.050	87.500	0.150	12.500

2. Persentase Jembatan Kabupaten kondisi baik

Capaian indikator persentase panjang jembatan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator persentase panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data kondisi jembatan tahun 2020. Data Kondisi jembatan menyajikan panjang jembatan kabupaten dalam kondisi Baik, Sedang , Rusak Ringan dan Rusak Berat. Data ini merupakan hasil pemutakhiran kondisi jembatan yang ada dengan pembaharuan kondisi terakhir berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jembatan. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jembatan pada tahun 2020 seperti terlihat pada gambar berikut :



Pembangunan Jembatan Rangka Binjai (Lanjutan) Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2020

Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah jembatan tahun 2020 adalah 450 unit jembatan, seperti terlihat tabel berikut :

Tabel 3.10 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2020

No	Kecamatan	Tipe/Kondisi				
		Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	10	14	2	2	28
2	BAYANG	9	10	2	0	21
3	BAYANG UTARA	1	1	8	0	10
4	IV JURAI	10	11	1	1	23
5	BATANG KAPAS	11	11	11	0	33
6	SUTERA	6	9	2	0	17
7	LENGAYANG	31	29	9	2	71
8	RANAH PESISIR	20	13	9	0	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	22	11	2	0	35
10	AIRPURA	3	7	4	0	14
11	PANCUNG SOAL	9	13	4	0	26
12	BASA AMPEK BALAI	8	6	0	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	2	0	0	4
14	LUNANG	18	13	19	2	52
15	SILAUT	29	10	19	2	60
TOTAL		189	160	92	9	450

Tabel 3.11 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2019

No	Kecamatan	Tipe/Kondisi				
		Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	10	14	2	2	28
2	BAYANG	9	10	2	0	21
3	BAYANG UTARA	1	1	8	0	10
4	IV JURAI	10	11	1	1	23
5	BATANG KAPAS	11	11	11	0	33
6	SUTERA	6	9	2	0	17
7	LENGAYANG	30	29	10	2	71
8	RANAH PESISIR	20	13	9	0	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	22	11	2	0	35
10	AIRPURA	3	7	4	0	14
11	PANCUNG SOAL	8	13	5	0	26
12	BASA AMPEK BALAI	7	6	0	1	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	2	0	0	4
14	LUNANG	18	13	19	2	52
15	SILAUT	28	10	19	3	60
TOTAL		185	160	94	11	450

Tabel 3.12 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2018

No	Kecamatan	Tipe/Kondisi				Jumlah Jembatan
		Kondisi				
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	9	14	2	3	28
2	BAYANG	9	10	2	0	21
3	BAYANG UTARA	1	1	7	0	9
4	IV JURAI	10	11	1	1	23
5	BATANG KAPAS	11	11	11	0	33
6	SUTERA	5	9	2	1	17
7	LENGAYANG	30	29	10	2	71
8	RANAH PESISIR	17	13	11	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	21	12	3	0	36
10	AIRPURA	3	7	4	0	14
11	PANCUNG SOAL	8	14	4	0	26
12	BASA AMPEK BALAI	7	6	1	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	2	0	0	4
14	LUNANG	18	13	19	2	52
15	SILAUT	28	9	20	3	60
TOTAL		179	161	97	13	450

Tabel 3.13 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2017

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	9	10	7	2	28
2	BAYANG	8	6	6	1	21
3	BAYANG UTARA	1	0	8	0	9
4	IV JURAI	9	7	6	1	23
5	BATANG KAPAS	10	6	16	1	33
6	SUTERA	5	10	1	1	17
7	LENGAYANG	30	23	12	6	71
8	RANAH PESISIR	17	10	13	2	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	18	12	3	2	35
10	AIRPURA	3	6	5	0	14
11	PANCUNG SOAL	7	14	3	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	7	6	0	1	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	0	2	0	4
14	LUNANG	18	7	22	5	52
15	SILAUT	28	7	16	9	60
TOTAL		172	124	120	33	449

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Tabel 3.14 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	8	8	5	6	27
2	BAYANG	6	6	6	3	21
3	BAYANG UTARA	0	0	9	0	9
4	IV JURAI	3	2	16	2	23
5	BATANG KAPAS	5	0	28	0	33
6	SUTERA	1	5	8	3	17
7	LENGAYANG	16	25	24	6	71
8	RANAH PESISIR	8	0	33	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	6	0	27	2	35
10	AIRPURA	3	0	11	0	14
11	PANCUNG SOAL	4	0	20	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6	0	8	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	0	0	4	0	4
14	LUNANG	20	0	30	2	52
15	SILAUT	24	0	29	7	60
TOTAL		110	46	258	34	448

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Tabel 3.15 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2015

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	7	0	20	1	28
2	BAYANG	5	0	21	1	27
3	BAYANG UTARA	0	0	9	0	9
4	IV JURAI	4	0	18	1	23
5	BATANG KAPAS	5	0	28	0	33
6	SUTERA	4	0	21	0	25
7	LENGAYANG	14	0	54	3	71
8	RANAH PESISIR	8	0	33	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	6	0	27	2	35
10	AIRPURA	3	0	11	0	14
11	PANCUNG SOAL	4	0	20	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6	0	8	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	0	0	4	0	4
14	LUNANG	21	0	30	1	52
15	SILAUT	25	0	28	7	60
TOTAL		112	0	332	19	463

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

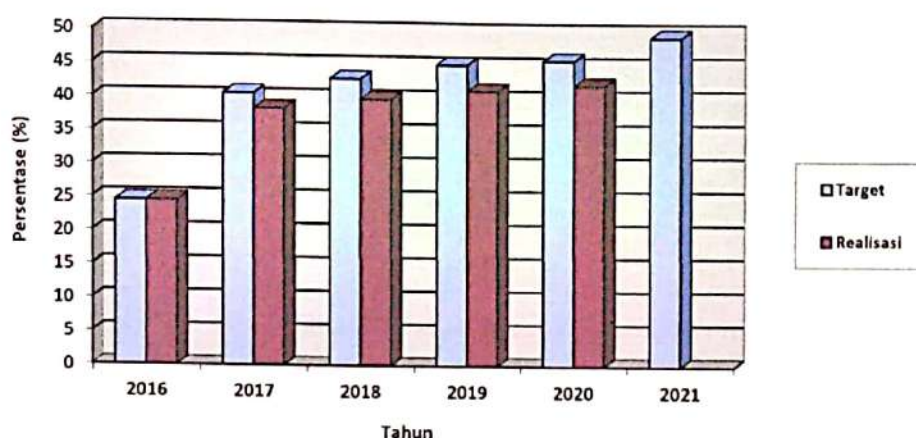
Persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2020 adalah :

$$= \frac{189}{450} \times 100\% = 42\%$$

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	24.55	40.53	42.76	44.98	45.66	49.14
2	Realisasi	24.55	38.31	39.78	41.11	42	



Gambar 3.3

Target dan realisasi per tahun Jembatan Kondisi baik menurut Renstra 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator jembatan kabupaten kondisi baik, sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 s/d 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jembatan kabupaen kondisi baik	%	24.55	38.31	39.78	41.11	42	100	94.52	93.03	91.40	91.98

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik dan dapat di lihat bahwa jumlah jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebanyak 4 Unit pada tahun 2020.

Tabel 3.18
Kenaikan Jumlah jembatan kondisi baik tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik (unit)	112	110	172	179	185	189



Gambar 3.4 Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik tahun 2015 s/d 2020

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Maupun Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam mendukung aksesibilitas jalan dan jembatan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal – tujuan tepat waktu, aman dan nyaman sangat tinggi baik dari sisi penyediaan dana maupun pembinaan dan pengawasan mutu jalan daerah.
2. Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah menjadi kegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik secara berkala, rutin maupun periodic setiap tahunnya.

Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan adalah :

1. Data base jalan dan Jembatan belum terupdate secara maksimal.
2. Kegiatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan belum optimal dilaksanakan untuk semua unit jembatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan

Strategi / Upaya Pemecahan Masalah adalah :

1. Penyiapan Dokumen pemetaan jaringan jalan dan jembatan yang terupdate sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
2. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara rutin
3. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur dan penyedia jasa sebagai unsur pelaksana pembangunan melalui diklat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik jalan dan jembatan.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan antara lain dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.18
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.688.341.140	7.357.913.024	95.70
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.246.377.468	66.357.413.117	97.23
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	208.594.613	203.367.400	97.49
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong	1.265.540.014	1.202.808.950	95.04
5	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan	1.391.590.000	1.260.522.880	90.58
6	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	900.000.000	824.245.000	91.59
Jumlah		79.700.443.235	77.206.310.371	96.87

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 79.700.443.235 terealisasi sebesar Rp. 77.206.310.371 atau 96.87 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.13 % atau Rp. 2.494.132.864

Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

- a. Persentase penduduk berakses air minum /bersih
- b. Persentase akses sanitasi layak

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penduduk berakses air minum /bersih	%	96.16	95.59	99.41
2	Persentase akses sanitasi layak	%	75.16	75.27	100.15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1. Persentase penduduk berakses air minum /bersih

Capaian indicator Persentase Penduduk Berakses air minum /bersih di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indicator Persentase cakupan air minum /bersih tahun 2020 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2020

Yaitu sambungan rumah PDAM tahun 2020, sambungan rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Sambungan Rumah Pamsimas Tahun 2020.

Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2020 dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 3.20

ANALISA DATA CAKUPAN

AKSES PENYEDIAAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN PESIRIS SELATAN
SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA A JP	JUMLAH RUMAH TANGGA NON JP	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM								AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR		
					JARINGAN PERPIPAAN		NON PERPIPAAN												
					PDAM		NON PDAM		(SGL + PMA + PAH)										
					(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)		(Ruta)	(%)
					(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)		(Ruta)	(%)
	JUMLAH	107,610	26,863	80,747	22,778	21.17	20,724	19.26	59,364	55.17	102,866	95.59	4,744	4.41					
I	SILAUT	3,552	0	3,552	-	-	2,042	57.49	1,453	40.91	3,495	98.40	57	1.60					
	1	Silaut	678	678	-	-	239	35.25	435	64.16	674	99.41	4	0.59					
	2	Sambungo	252	252	-	-	90.00	35.71	156	61.90	246	97.62	6	2.38					
	3	Air Hitam	332	332	-	-	85	25.60	244	73.49	329	99.10	3	0.90					
	4	Lubuk Bunta	384	384	-	-	295	76.82	81	21.09	376	97.92	8	2.08					
	5	Durian Seribu	318	318	-	-	167	52.52	149	46.86	316	99.37	2	0.63					
	6	Pasir Binjai	447	447	-	-	377	84.34	64	14.32	441	98.66	6	1.34					
	7	Talang Binjai	175	175	-	-	-	-	168	96.00	168	96.00	7	4.00					
	8	Sungai Serik Silaut	268	268	-	-	155.00	57.84	105	39.18	260	97.01	8	2.99					
	9	Sungai Pulai Silaut	378	378	-	-	364	96.30	7	1.85	371	98.15	7	1.85					
	10	Sungai Sirah Silaut	320	320	-	-	270	84.38	44	13.75	314	98.13	6	1.88					

II	LUNANG	5,065	0	5,065	-	-	2,335	46.10	2,673	52.77	5,008	98.87	57	1.13
	1	Lunang	859	859	-	-	-	-	854	99.42	854	99.42	5	0.58
	2	Lunang Selatan	441	441	-	-	121.00	27.44	314	71.20	435	98.64	6	1.36
	3	Lunang Utara	422	422	-	-	337.00	79.86	76	18.01	413	97.87	9	2.13
	4	Lunang Barat	381	381	-	-	346	90.81	31	8.14	377	98.95	4	1.05
	5	Sindang Lunang	394	394	-	-	100	25.38	290	73.60	390	98.98	4	1.02
	6	Lunang Satu	734	734	-	-	110	14.99	616	83.92	726	98.91	8	1.09
	7	Lunang Tengah	319	319	-	-	309.00	96.87	8	2.51	317	99.37	2	0.63
	8	Pondok Parliang Lunang	285	285	-	-	162	56.84	117	41.05	279	97.89	6	2.11
	9	Lunang Dua	680	680	-	-	650	95.59	22	3.24	672	98.82	8	1.18
	10	Lunang Tiga	550	550	-	-	200.00	36.36	345	62.73	545	99.09	5	0.91
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,246	494	2,752	362	11.15	273	8.41	2,549	78.53	3,184	98.09	62	1.91
	1	Tapan	210	135	36	17.14	-	-	165	78.57	201	95.71	9	4.29
	2	Batang Arah Tapan	534	349	167	31.27	-	-	359	67.23	526	98.50	8	1.50
	3	Pasar Tapan	357	238	54	15.13	-	-	298	83.47	352	98.60	5	1.40
	4	Ampang Tulak Tapan	197	197	-	-	-	-	189	95.94	189	95.94	8	4.06
	5	Koto Anau Tapan	367	367	-	-	-	-	364	99.18	364	99.18	3	0.82
	6	Dusun Baru Tapan	163	163	-	-	-	-	156	95.71	156	95.71	7	4.29
	7	Tanjung Pondok Tapan	431	431	-	-	-	-	425	98.61	425	98.61	6	1.39
	8	Batang Betung Tapan	513	398	105	20.47	-	-	403	78.56	508	99.03	5	0.97
	9	Riak Danau Tapan	278	278	-	-	82	29.50	189	67.99	271	97.48	7	2.52

	10	Bukit Buai Tapan	196		196	-	-	191	97.45	1.00	0.51	192	97.96	4	2.04
IV															
		RANAH AMPEK HULU TAPAN													
	1	Kubu Tapan	3,567	132	3,435	72	2.02	40	1.12	3,287	92.15	3,399	95.29	168	4.71
	2	Talang Koto Pulai Tapan	456		456	-	-	-	-	443	97.15	443	97.15	13	2.85
	3	Binjai Tapan	328	79	249	56	17.07	-	-	249	75.91	305	92.99	23	7.01
	4	Sungai Gambir Sako Tapan	178		178	-	-	40	22.47	112	62.92	152	85.39	26	14.61
	5	Simpang Gunung Tapan	159		159	-	-	-	-	157	98.74	157	98.74	2	1.26
	6	Kampung Tengah Tapan	214		214	-	-	-	-	206	96.26	206	96.26	8	3.74
	7	Sungai Pinang tapan	493	53	440	16	3.25	-	-	440	89.25	456	92.49	37	7.51
	8	Tebing Tinggi Tapan	540		540	-	-	-	-	534	98.89	534	98.89	6	1.11
	9	Talang Balarik Tapan	616		616	-	-	-	-	599	97.24	599	97.24	17	2.76
	10	Limau Purut Tapan	335		335	-	-	-	-	318	94.93	318	94.93	17	5.07
			248		248	-	-	-	-	229	92.34	229	92.34	19	7.66
V															
		PANCUNG SOAL	6,236	1,457	4,779	1,173	18.81	1,015	16.28	3,842	61.61	6,030	96.70	206	3.30
	1	Inderapura	400	153	247	138	34.50	125	31.25	122	30.50	385	96.25	15	3.75
	2	Muaro Sakai Inderapura	885	108	777	37	4.18	121	13.67	716	80.90	874	98.76	11	1.24
	3	Tiga Sepakat Inderapura	464	223	241	159	34.27	-	-	281	60.56	440	94.83	24	5.17
	4	Inderapura Barat	459	224	235	186	40.52	-	-	235	51.20	421	91.72	38	8.28
	5	Inderapura Selatan	916		916	-	-	308	33.62	594	64.85	902	98.47	14	1.53
	6	Kudo kudo Inderapura	753	311	442	280	37.18	-	-	442	58.70	722	95.88	31	4.12
	7	Simpang Lama Inderapura	690	265	425	230	33.33	13	1.88	432	62.61	675	97.83	15	2.17

8	Tiuk Amplu Inderapura	857	173	857	-	-	307	35.82	521	60.79	828	96.62	29	3.38
9	Inderapura Tengah	483	173	310	143	29.61	-	-	325	67.29	468	96.89	15	3.11
10	Tigo Sungai Inderapura	329		329	-	-	141.00	42.86	174	52.89	315	95.74	14	4.26
VI	AIR PURA	3,770	807	2,963	521	13.82	62.00	1.64	3,034	80.48	3,617	95.94	153	4.06
1	Inderapura Timur	669	139	530	75	11.21	-	-	590	88.19	665	99.40	4	0.60
2	Inderapura Utara	238	107	131	75	31.51	-	-	151	63.45	226	94.96	12	5.04
3	Pulau Rajo Inderapura	275		275	-	-	62.00	22.55	202	73.45	264	96.00	11	4.00
4	Tiuk Kualo Inderapura	308		308	-	-	-	-	299	97.08	299	97.08	9	2.92
5	Palokan Inderapura	318	67	251	1	0.31	-	-	301	94.65	302	94.97	16	5.03
6	Tanah Bakali Inderapura	776	175	601	115	14.82	-	-	651	83.89	766	98.71	10	1.29
7	Lubung Betung Inderapura	235	111	124	100.00	42.55	-	-	124	52.77	224	95.32	11	4.68
8	Damar Lapan Batang Inderapura	271		271	-	-	-	-	244	90.04	244	90.04	27	9.96
9	Muara Inderapura	314	141	173	125	39.81	-	-	173	55.10	298	94.90	16	5.10
10	Lalang Panjang Inderapura	366	67	299	30	8.20	-	-	299	81.69	329	89.89	37	10.11
VII	LINGGO SARI BAGANTI	10,632	2,285	8,347	1,686	15.86	1,076	10.12	7,602	71.50	10,364	97.48	268	2.52
1	Air Haji	663	415	248	341	51.43	-	-	298	44.95	639	96.38	24	3.62
2	Pasar Lama Muara Air Haji	762	276	486	214	28.08	-	-	536	70.34	750	98.43	12	1.57
3	Muara Gadang Air Haji	499	194	305	151	30.26	-	-	335	67.13	486	97.39	13	2.61
4	Air Haji Barat	628	138	490	77	12.26	-	-	540	85.99	617	98.25	11	1.75
5	Pasar Bukit Air haji	568		568	-	-	-	-	560	98.59	560	98.59	8	1.41

6	Sei Sirah Air haji	525		525	-	-	377	71.81	132	25.14	509	96.95	16	3.05
7	Rantau Simalenang Air Haji	711	126	585	67	9.42	57	8.02	578	81.29	702	98.73	9	1.27
8	Air Haji Tengah	636	104	532	66	10.38	-	-	562	88.36	628	98.74	8	1.26
9	Air Haji Tenggara	774	68	706	42	5.43	30.00	3.88	676	87.34	748	96.64	26	3.36
10	Punggasan	576	151	425	106	18.40	-	-	465	80.73	571	99.13	5	0.87
11	Muara Kandis Punggasan	538	77	461	43	7.99	-	-	461	85.69	504	93.68	34	6.32
12	Punggasan Timur	875	109	766	58	6.63	142	16.23	664	75.89	864	98.74	11	1.26
13	Padang Xi Punggasan	818	39	779	2	0.24	196	23.96	583	71.27	781	95.48	37	4.52
14	Lagan Mudik Punggasan	519		519	-	-	-	-	504	97.11	504	97.11	15	2.89
15	Lagan Hilir Punggasan	642	273	369	232	36.14	153	23.83	246	38.32	631	98.29	11	1.71
16	Punggasan Utara	898	315	583	287	31.96	121	13.47	462	51.45	870	96.88	28	3.12
VIII	RANAH PESISIR	7,132	1,401	5,731	1,113	15.61	1,166	16.35	4,603	64.54	6,882	96.49	250	3.51
1	Sungai Tunu	637		637	-	-	240	37.68	380	59.65	620	97.33	17	2.67
2	Palangai	623	206	417	113	18.14	89	14.29	378	60.67	580	93.10	43	6.90
3	Sungai Tunu Barat	640		640	-	-	127	19.84	475	74.22	602	94.06	38	5.94
4	Sungai Tunu Utara	581		581	-	-	228	39.24	346	59.55	574	98.80	7	1.20
5	Nyir Malambai Palangai	854	210	644	172	20.14	134	15.69	510	59.72	816	95.55	38	4.45
6	Palangai Kaciak	570	245	325	195	34.21	40	7.02	315	55.26	550	96.49	20	3.51
7	Palangai Gadang	609	197	412	171	28.08	20	3.28	392	64.37	583	95.73	26	4.27
8	Koto VIII Palangai	998	315	683	281	28.16	83	8.32	620	62.12	984	98.60	14	1.40
9	Pasla Palangai	750	228	522	181	24.13	-	-	542	72.27	723	96.40	27	3.60
10	Sungai Liku Palangai	870		870	-	-	205	23.56	645	74.14	850	97.70	20	2.30

IX	LENGAYANG	12,376	3,503	8,873	3,215	25.98	1,977	15.97	7,051	56.97	12,243	98.93	133	1.07
	1	Lakitan	1,018	478	540	458	44.99	-	550	54.03	1,008	99.02	10	0.98
	2	Kambang	1,415	516	899	494	34.91	271	640	45.23	1,405	99.29	10	0.71
	3	Lakitan Selatan	1,246	583	663	540	43.34	-	683	54.82	1,223	98.15	23	1.85
	4	Lakitan Tengah	974	446	528	427	43.84	248	290	29.77	965	99.08	9	0.92
	5	Lakitan Timur	491	304	187	277	56.42	-	202	41.14	479	97.56	12	2.44
	6	Lakitan Utara	1,369	249	1,120	225	16.44	145.00	985	71.95	1,355	98.98	14	1.02
	7	Kambang Barat	1,960	504	1,456	464	23.67	-	1,481	75.56	1,945	99.23	15	0.77
	8	Kambang Utara	1,930	291	1,639	238	12.33	549	1,123	58.19	1,910	98.96	20	1.04
	9	Kambang Timur	1,973	132	1,841	92	4.66	764	1,097	55.60	1,953	98.99	20	1.01
X	SUTERA	11,889	4,425	7,464	3,866	32.52	896	7.54	6,691	56.28	11,453	96.33	436	3.67
	1	Amping Parak	1,940	1,070	870	978	50.41	-	920	47.42	1,898	97.84	42	2.16
	2	Suranthi	1,867	1,162	705	1,078	57.74	-	745	39.90	1,823	97.64	44	2.36
	3	Taratak	567	123	444	36	6.35	97	382	67.37	515	90.83	52	9.17
	4	Amping Parak Timur	1,107	561	546	521	47.06	163	388	35.05	1,072	96.84	35	3.16
	5	Aur Duri Suranthi	1,204	683	521	643	53.41	-	531	44.10	1,174	97.51	30	2.49
	6	Rawang Gunung Malelo Suranthi	1,412	237	1,175	169	11.97	129	1,076	76.20	1,374	97.31	38	2.69
	7	Koto Nan Tigo Selatan Suranthi	860	266	594	237	27.56	56	538	62.56	831	96.63	29	3.37
	8	Koto Nan Tigo Utara Suranthi	583	231	352	148	25.39	-	392	67.24	540	92.62	43	7.38
	9	Ganting Mudiak Selatan Suranthi	681		681	-	-	143	508	74.60	651	95.59	30	4.41
	10	Ganting Mudiak Utara Suranthi	577		577	-	-	186.00	359.00	62.22	545	94.45	32	5.55
	11	Lansano Taratak	625	92	533	56	8.96	-	533	85.28	589	94.24	36	5.76

	12	Koto Taratak	466		466	-	-	122	26.18	319	68.45	441	94.64	25	5.36
XI	BATANG KAPAS		7,407	2,192	5,215	1,977	26.69	1,098	14.82	3,912	52.81	6,987	94.33	420	5.67
	1	IV Koto Hillie	2,157	852	1,305	743	34.45	30	1.39	1,275	59.11	2,048	94.95	109	5.05
	2	IV Koto Mudiek	604	311	293	285	47.19	40	6.62	253	41.89	578	95.70	26	4.30
	3	Taluak	565		565	-	-	100	17.70	388	68.67	488	86.37	77	13.63
	4	Koto Nan Tigo IV Koto Hillie	755		755	-	-	324	42.91	323	42.78	647	85.70	108	14.30
	5	Koto Nan Duo IV Koto Hillie	1,104		1,104	-	-	197	17.84	903	81.79	1,100	99.64	4	0.36
	6	Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	610	520	90	477	78.20	65	10.66	25	4.10	567	92.95	43	7.05
	7	Tuik IV Koto Mudiek	662	437	225	432	65.26	80	12.08	145	21.90	657	99.24	5	0.76
	8	Taratak Tampatih IV Koto Mudiek	546	72	474	40	7.33	122	22.34	352	64.47	514	94.14	32	5.86
	9	Taluk Tigo Sakato	404		404	-	-	140	34.65	248	61.39	388	96.04	16	3.96
XII	IV JURAI		10,942	6,316	4,626	5,817	53.16	2,109	19.27	2,317	21.18	10,243	93.61	699	6.39
	1	Painan	1,385	1,105	280	1,074	77.55	-	-	280	20.22	1,354	97.76	31	2.24
	2	Painan Selatan	1,085	776	309	747	68.85	-	-	309	28.48	1,056	97.33	29	2.67
	3	Painan Timur	1,188	998	190	938	78.96	-	-	190	15.99	1,128	94.95	60	5.05
	4	Salido	1,776	1,237	539	1,164	65.54	-	-	539	30.35	1,703	95.89	73	4.11
	5	Bungo Pasang Salido	920	522	398	467	50.76	240	26.09	158	17.17	865	94.02	55	5.98
	6	Sago Salido	1,106	1,000	106	964	87.16	-	-	106	9.58	1,070	96.75	36	3.25
	7	Tambang	429	58	371	35	8.16	279	65.03	92	21.45	406	94.64	23	5.36
	8	Salido Sari Bulan	349	68	281	10	2.87	234	67.05	50	14.33	294	84.24	55	15.76

9	Koto Rawang	340		340	-	-	144	42.35	138	40.59	282	82.94	58	17.06
10	Bukit Kaciak Lumbo	248	207	41	171	68.95	-	-	41	16.53	212	85.48	36	14.52
11	Sungai Sariak Lumbo	183		183	-	-	130	71.04	21	11.48	151	82.51	32	17.49
12	Gunuang Bungkuak Lumbo	155		155	-	-	119	76.77	17	10.97	136	87.74	19	12.26
13	Ampang Tareh Lumbo	268		268	-	-	194	72.39	32	11.94	226	84.33	42	15.67
14	Ampuan Lumbo	238	51	187	30	12.61	139	58.40	48	20.17	217	91.18	21	8.82
15	Balai Sinayan Lumbo	147	29	118	14	9.52	103	70.07	15	10.20	132	89.80	15	10.20
16	Lumbo	237	192	45	166	70.04	-	-	45	18.99	211	89.03	26	10.97
17	Taratak Tengah Lumbo	256	73	183	37	14.45	35	13.67	148	57.81	220	85.94	36	14.06
18	Batu Kunik Lumbo	176		176	-	-	172	97.73	3	1.70	175	99.43	1	0.57
19	Limau Gadang Lumbo	236		236	-	-	163	69.07	32	13.56	195	82.63	41	17.37
20	Sungai Gayo Lumbo	220		220	-	-	157	71.36	53	24.09	210	95.45	10	4.55
XIII	BAYANG	8,655	2,964	5,691	2,365	27.33	1,423	16.44	4,030	46.56	7,818	90.33	837	9.67
1	Pasar Baru	929	262	667	209	22.50	-	-	667	71.80	876	94.29	53	5.71
2	Talaok	502	178	324	162	32.27	-	-	324	64.54	486	96.81	16	3.19
3	Koto Barapak	565	184	381	105	18.58	-	-	381	67.43	486	86.02	79	13.98
4	Gurun Panjang	445	238	207	227	51.01	112	25.17	95	21.35	434	97.53	11	2.47
5	Api Api Pasar Baru	515	133	382	54	10.49	-	-	382	74.17	436	84.66	79	15.34
6	Tanjung Durian Pasar Baru	479	172	307	138	28.81	-	-	307	64.09	445	92.90	34	7.10
7	Asam Kamba Pasar Baru	472	115	357	49	10.38	-	-	357	75.64	406	86.02	66	13.98
8	Sawah Laweh Pasar Baru	704		704	-	-	470	66.76	227	32.24	697	99.01	7	0.99

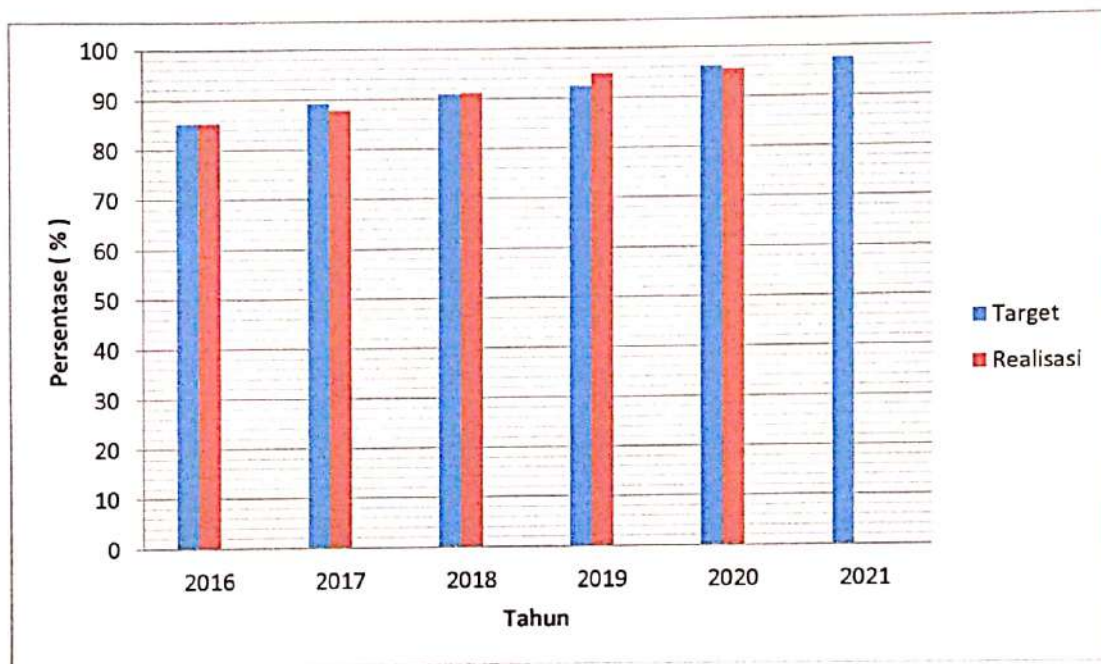
	9	Kapeh Panji Jaya Talaok	589	314	275	278	47.20	-	-	275	46.69	553	93.89	36	6.11	
	10	Aur Bagelung Talaok	487	94	393	28	5.75	-	-	393	80.70	421	86.45	66	13.55	
	11	Kapelgam Koto Berapak	512	450	62	361	70.51	-	-	62	12.11	423	82.62	89	17.38	
	12	Koto Baru Koto Berapak	374		374	-	-	303	81.02	19	5.08	322	86.10	52	13.90	
	13	Kubang Koto Berapak	358		358	-	-	223	62.29	37	10.34	260	72.63	98	27.37	
	14	Kapujan Koto Berapak	404		404	-	-	240	59.41	83	20.54	323	79.95	81	20.05	
	15	Gurun Panjang Utara	474	442	32	420	88.61	-	-	32	6.75	452	95.36	22	4.64	
	16	Gurun Panjang Barat	306	296	10	281	91.83	-	-	10	3.27	291	95.10	15	4.90	
	17	Gurun Panjang Selatan	540	86	454	53	9.81	75	13.89	379	70.19	507	93.89	33	6.11	
	IV	NAGARI BAYANG UTARA														
			1,713	221	1,492	183	10.68	803	46.88	544	31.76	1,530	89.32	183	10.68	
	1	Puluik Puluik	409		409	-	-	354	86.55	49	11.98	403	98.53	6	1.47	
	2	Puluik Puluik Selatan	456	221	235	183	40.13	80	17.54	155	33.99	418	91.67	38	8.33	
	3	Koto Ranah	218		218	-	-	110	50.46	73	33.49	183	83.94	35	16.06	
	4	Muaro Ale	93		93	-	-	25	26.88	37	39.78	62	66.67	31	33.33	
	5	Pancung Taba	270		270	-	-	197	72.96	46	17.04	243	90.00	27	10.00	
	6	Lima Gadang	267		267	-	-	37	13.86	184	68.91	221	82.77	46	17.23	
	XV	KOTO XI TARUSAN	11,428	666	10,762	428	3.75	4,409	38.58	5,776	50.54	10,613	92.87	815	7.13	
	1	Kapuh	1,077		1,077	-	-	-	-	1,024	95.08	1,024	95.08	53	4.92	
	2	Kapuh Utara	460		460	-	-	179	38.91	227	49.35	406	88.26	54	11.74	

3	Jinang Kp. Pansur Ampang Pulai	576	113	463	25	4.34	-	-	-	463	80.38	488	84.72	88	15.28
4	Pulau Karam Ampang Pulai	508	78	430	25	4.92	-	-	-	430	84.65	455	89.57	53	10.43
5	Ampang Pulai	862	73	789	60	6.96	217	25.17	-	572	66.36	849	98.49	13	1.51
6	Carokok Anau Ampang Pulai	261	45	216	21	8.05	116	44.44	-	100	38.31	237	90.80	24	9.20
7	Nanggalo	748		748	-	-	-	-	-	685	91.58	685	91.58	63	8.42
8	Setara Nanggalo	543		543	-	-	352	64.83	-	180	33.15	532	97.97	11	2.03
9	Batu Hampar Selatan	438		438	-	-	48	10.96	-	347	79.22	395	90.18	43	9.82
10	Batu Hampar	285		285	-	-	285	100.00	-	0	0.00	285	100.00	-	0.00
11	Mandeh	322	200	122	180.00	55.90	30	9.32	-	92	28.57	302	93.79	20	6.21
12	Sungai Nyalo Mudiak Aia	187		187	-	-	66	35.29	-	103	55.08	169	90.37	18	9.63
13	Sungai Pinang	318		318	-	-	-	-	-	284	89.31	284	89.31	34	10.69
14	Duku	938		938	-	-	813	86.67	-	87	9.28	900	95.95	38	4.05
15	Duku Utara	577		577	-	-	564	97.75	-	10	1.73	574	99.48	3	0.52
16	Barung Barung Balantai Selatan	390		390	-	-	88	22.56	-	273	70.00	361	92.56	29	7.44
17	Barung Barung Balantai Tengah	393		393	-	-	227	57.76	-	127	32.32	354	90.08	39	9.92
18	Barung Barung Balantai	570	157	413	117	20.53	210	36.84	-	203	35.61	530	92.98	40	7.02
19	Barung Barung Balantai Timur	316		316	-	-	215	68.04	-	68	21.52	283	89.56	33	10.44
20	Kampung Baru Korong Nan Ampek	194		194	-	-	194	100.00	-	0	0.00	194	100.00	-	0.00
21	Taratak Sungai Lundang	564		564	-	-	205	36.35	-	251	44.50	456	80.85	108	19.15
22	Siguntur Tua	201		201	-	-	151	75.12	-	26	12.94	177	88.06	24	11.94
23	Siguntur	700		700	-	-	449	64.14	-	224	32.00	673	96.14	27	3.86

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Cakupan air minum / bersih.

Tabel 3. 21 Target dan Realisasi Penduduk Berakses Air Miumm / Bersih

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	97,71
2	Realisasi (%)	85,37	87,86	91,22	94,88	95,59	-



Gambar 3.5

Target dan realisasi per tahun Cakupan Air Minum / Bersih menurut Renstra Revisi Tahun 2016 - 2021
 Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum pada tahun 2020 seperti terlihat pada gambar berikut :



*Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Kp. Sawah Nagari Batu Hampar Selatan
Kec. Koto XI Tarusan Tahun 2020*

Capaian indikator persentase penduduk berakses air minum /bersih di hitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$\frac{102,866}{107,610} \times 100\% = 95.59\%$$

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Indikator Persentase Penduduk berakses air minum /bersih Tahun 2016 s/d 2020

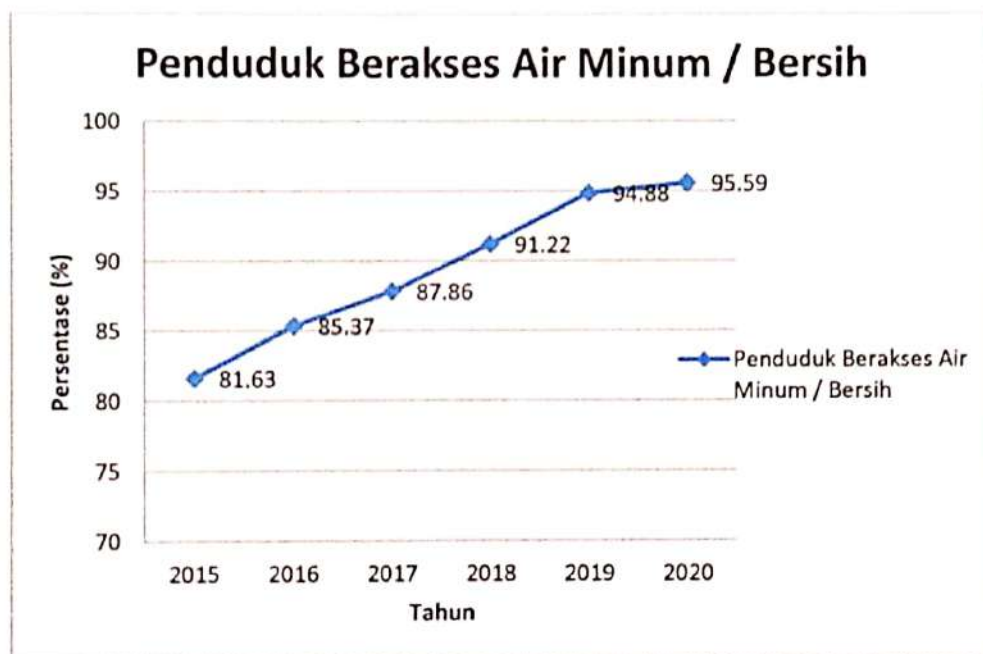
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penduduk berakses air minum /bersih	%	85.37	87.86	91.22	94.88	95.59	100	98.40	100.22	102.61	99.41

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Penduduk berakses air minum /bersih dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.23
Kenaikan cakupan air minum/ bersih tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Berakses Air Minum / Bersih (%)	81.63%	85.37	87.86	91.22	94.88	95.59

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk berakses air minum / bersih mengalami peningkatan 0.71 % pada tahun 2020.



Gambar 3.6 Kenaikan cakupan air minum/ bersih tahun 2015 s/d 2020

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

Capaian indikator Persentase Akses Sanitasi Layak di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indicator Persentase Akses Sanitasi Layak tahun 2020 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2020 , sambungan Rumah IPAL Komunal tahun 2020 dan Jumlah sambungan rumah Hibah Australia tahun 2020
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Pada Tahun 2020 Sebagai berikut :

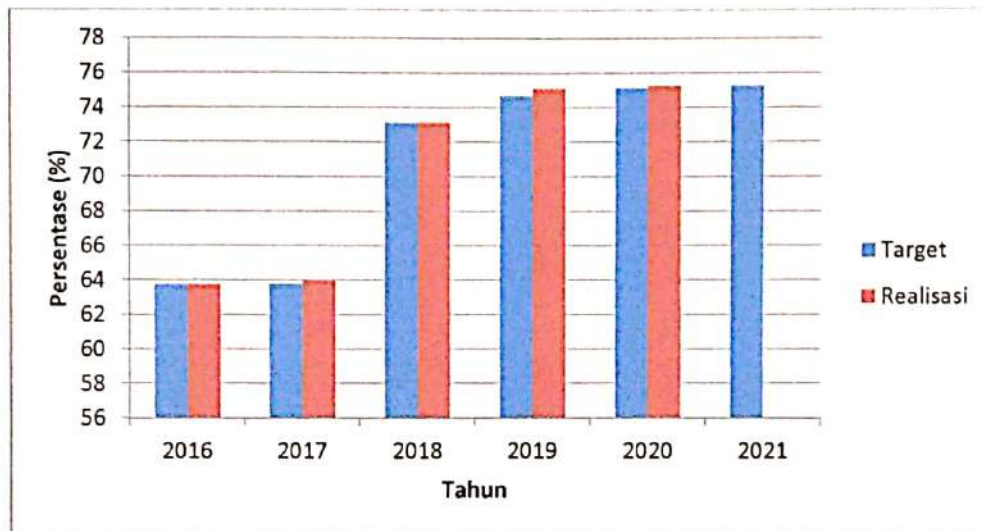
Tabel 3.24
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2019	Tambahan Jamban Pribadi Tahun 2020	Tambahan Sambungan Rumah (SR) Kegiatan APBD Tahun 2020	Tambahan Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2020	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2020	Ket
		(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9
	JUMLAH	107.610	79.782	545	675	1.220	81.002	
I	SILAUT	3.505	2.642	30	-	30	2.672	
II	LUNANG	5.065	3.047	30	-	30	3.077	
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3.246	2.227	27	50	77	2.304	
IV	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3.567	2.254	33	100	133	2.387	
V	PANCUNG SOAL	6.236	4.003	30	100	130	4.163	
VI	AIR PURA	3.770	3.219	30	100	130	3.349	
VII	LINGGO SARI BAGANTI	10.632	8.561	48	100	148	8.709	
VIII	RANAH PESISIR	7.132	6.229	30	75	105	6.334	
IX	LENGAYANG	12.376	7.828	27	-	27	7.855	
X	SUTERA	11.889	10.165	36	-	36	10.201	
XI	BATANG KAPAS	7.407	4.649	27	-	27	4.676	
XII	IV JURAI	10.942	9.485	59	75	134	9.619	
XIII	BAYANG	8.655	6.246	51	-	51	6.297	
XIV	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.713	1.180	18	-	18	1.198	
XV	KOTO XI TARUSAN	11.428	8.017	69	75	144	8.1615	

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Cakupan Sanitasi.

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Akses Sanitasi Layak

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	63.76	63.80	73.13	74.68	75.16	75.29
2	Realisasi (%)	63.76	64.01	73.17	75.13	75.27	



Gambar 3.7
Target dan realisasi per tahun akses Sanitasi layak menurut Renstra Revisi Tahun 2016 – 2021

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2020 seperti terlihat pada gambar berikut :



*Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Pasar Tapan
Kec. Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020*

Persentase Cakupan Sanitasi tahun 2020 adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{81.002}{107.610} \times 100\% = 75,27\%$$

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Sanitasi Tahun 2016 s/d 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Akses Sanitasi Layak	%	63.76	64.01	73.17	75.13	75.27	100	100.33	100.05	100.60	100.15

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase Akse Sanitasi Layak dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.27
Kenaikan akses sanitasi layak tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	Tahun				2019	2020
		2015	2016	2017	2018		
1	Akses						
	Sanitasi	62.90	63.76	64.01	73.17	75.13	75.27
	Layak (%)						

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa akses sanitasi layak mengalami peningkatan 0.14 % pada tahun 2020.



Gambar 3.8 Kenaikan cakupan sanitasi tahun 2015 s/d 2020

Faktor – factor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindak lanjuti dan dicari solusinya
2. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari

3. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari
4. Melalui pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan ke Pokjaan sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.
5. Disamping itu juga dibina hubungan antar instansi terutama yang terlibat langsung dalam pencapaian akses sanitasi terutama Dinas Kesehatan yang melakukan upaya peningkatan akses sanitasi melalui perubahan perilaku masyarakat yang biasa dikenal melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat tahun 2020 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian(%)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	13.591.625.963	4.969.878.650	36,57
2	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3.665.571.310	3.579.180.850	97,64
	Total	17.257.197.273	8.549.059.500	49,54

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 17.257.197.273 terealisasi sebesar Rp. 8.549.059.500 atau 49,54 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar 50.46 % atau Rp. 8.708.137.773

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Di Tetapkan
2. Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2020 telah menetapkan 4 (empat) Peraturan sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
2. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
 - a. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Carocok Painan , Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016
 - b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Rumah Sakit Baru , Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016
 - c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Carocok Tarusan , Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016

Berikut ini gambaran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang tahun 2020 untuk dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan dengan target 25 % dengan realisasi 12.5%, sedangkan untuk kawasan penyediaan ruang terbuka hijau dengan target 66.14% dengan realisasi kegiatan 66.14%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Tata Ruang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan	%	25	12.5	50
2	Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	%	66.14	66.14	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan

Capaian Indikator persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan dengan rumus:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Jumlah Dokumen Tata Ruang yang di Perda}} \\
 \hline
 \boxed{\text{Jumlah Dokumen}}
 \end{array}
 \times
 \boxed{100\%}$$

$$= \frac{4}{32} \times 100\% = 12,5\%$$

Rencana penetapan rencana tata ruang sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang
 - a. Rencana Tata ruang wilayah (RTRW)
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - RDTR Perkotaan Tapan
 - RDTR Perkotaan Painan
 - RDTR Perkotaan Tarusan
 - RDTR Perkotaan Pasar Baru
 - RDTR Perkotaan Kambang
 - RDTR Perkotaan Inderapura
 - RDTR Perkotaan Lunang

- RDTR Perkotaan Barung - Belantai
- RDTR Perkotaan Asam Kumbang
- RDTR Perkotaan Lumpo
- RDTR Perkotaan Pasar Kuok
- RDTR Perkotaan Surantih
- RDTR Perkotaan Amping Parak
- RDTR Perkotaan Koto Baru Lengayang
- RDTR Perkotaan Lubuk Sarik
- RDTR Perkotaan Lakitan
- RDTR Perkotaan Balai Selasa
- RDTR Perkotaan Air Haji
- RDTR Perkotaan Muaro Sakai
- RDTR Perkotaan Sindang
- RDTR Perkotaan Silaut
- RDTR Perkotaan Kumbang

b. Kawasan Strategis

Rencana rinci tata ruang sebagai berikut :

- Kawasan Mandeh
- Kawasan Panca Bulan
- Kawasan Mandeh Rubiah
- Kawasan Istana Indrapura

2. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

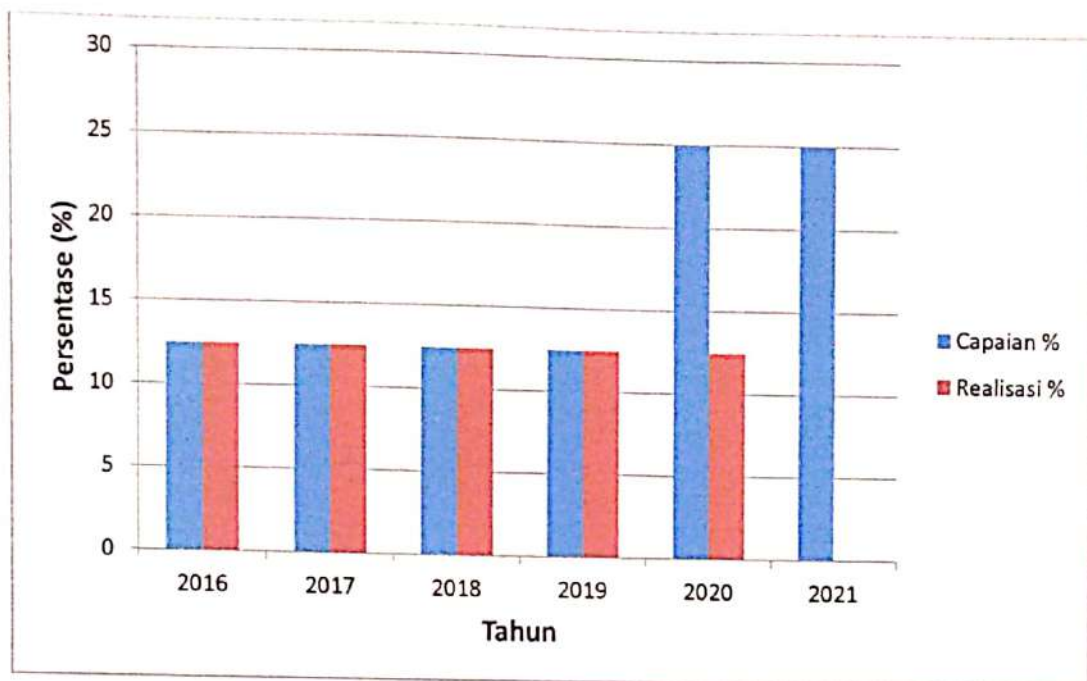
Dengan rincian sebagai berikut :

- RTBL Kawasan Carocok Tarusan
- RTBL Kawasan Rumah Sakit Baru
- RTBL Kawasan Carocok Painan
- RTBL Kawasan Mandeh
- RTBL Kawasan Sungai Nyalo

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan

Tabel 3.30
Target dan realisasi Persentase dokumen dan regulasi tata ruang
yang telah ditetapkan

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	12.5	12.5	12.5	12.5	25	25
2	Realisasi (%)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	



Tabel 3.9 Target dan Realisasi Per tahun dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan menurut Renstra Tahun 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan sebagai berikut :

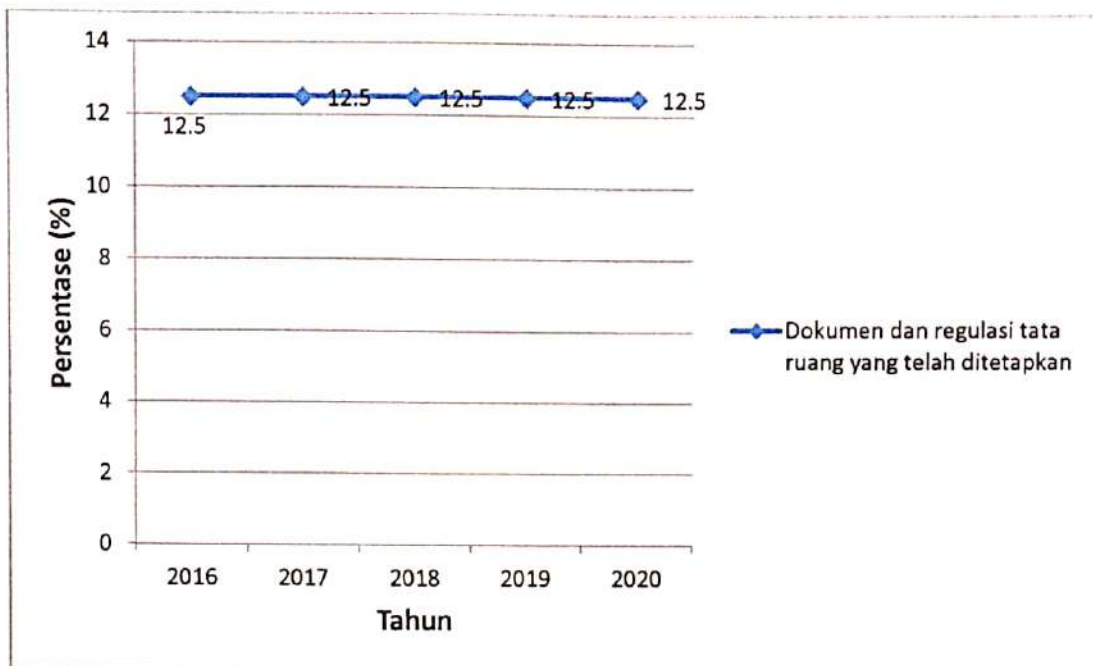
Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indikator Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Di Tetapkan Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Di Tetapkan	%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	100	100	100	100	50

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.32
Kenaikan Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5



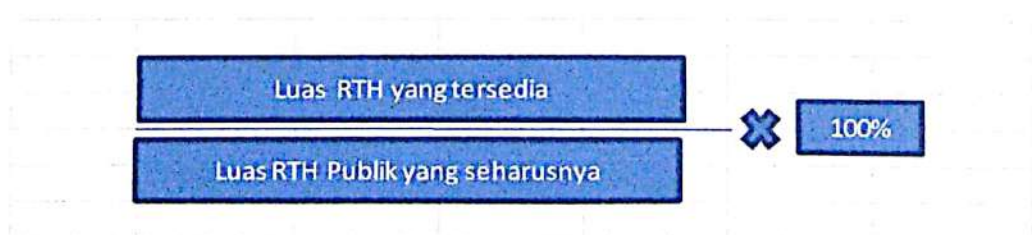
Gambar 3.10 Kenaikan Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan tahun 2016 s/d 2020

2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penyusunan Rencana Detail Tata ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan terdiri dari:

1. Sepadan Sungai dan Pantai
2. Pemakaman
3. Lapangan olahraga
4. Taman skala Nagari, Kecamatan dan Kota
5. Hutan Kota
6. Taman Atap Bangunan

Capaian Indikator persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau dengan rumus



$$= \frac{924.02}{1396.9} \times 100 \% = 66.14 \%$$

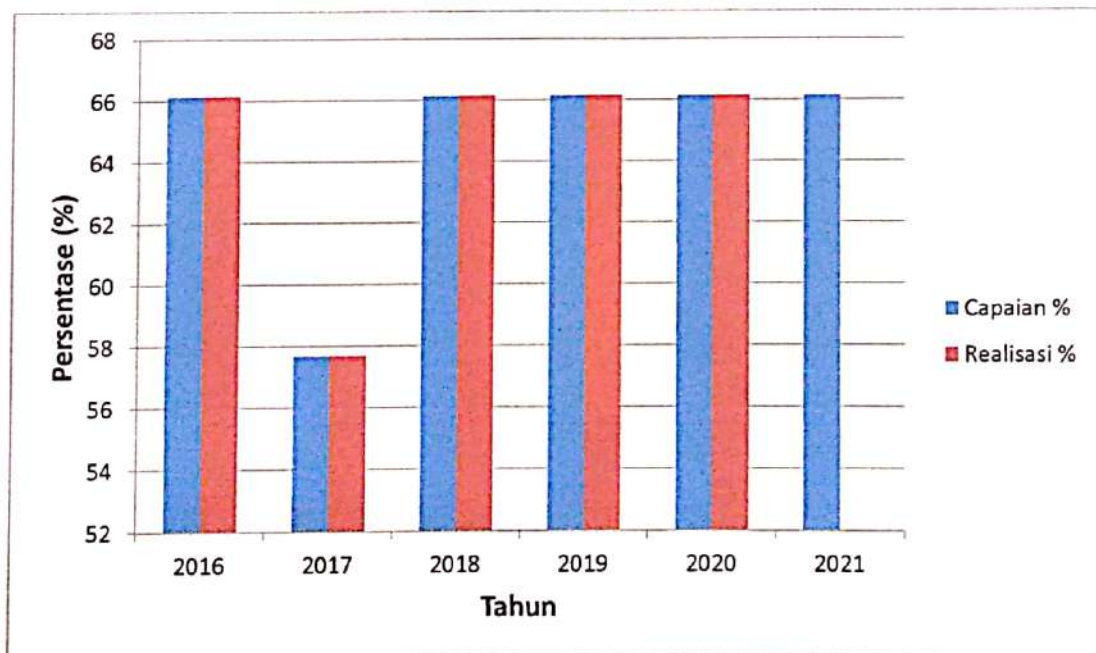
Rencana Detail Tata Ruang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 5 dokumen RDTR, ruang terbuka hijau telah indentifikasi seluas 924.02 Ha sedangkan luas RTH seharusnya sebesar 1396. 9 Ha . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang penyediaan RTH 20% dari luas Perkotaan, berdasarkan peraturan masih ada kekurangan penyedian Ruang Terbuka Hijau sebesar 472.88 Ha.

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka HIjau .

Tabel 3.33

Target dan realisasi Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka HIjau

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	66.14	57.69	66.14	66.14	66.14	66.14
2	Realisasi (%)	66.14	57.69	66.14	66.14	66.14	



Gambar 3.11 Target dan Realisasi Per tahun Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau menurut Renstra Tahun 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	%	66.14	57.69	66.14	66.14	66.14	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Tata Ruang	101.025.000,00	101.590.000,00	95,57
2	Program Pemanfaatan Ruang	54.983.557,00	54.092.500,00	98,38
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.667.032.355,00	1.657.357.950,00	99,42
4	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan	5.410.508.965,00	5.330.627.200,00	98,52
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	448.767.971,00	377.383.605,00	84,09
	Total	7.682.317.848,00	7.521.051.255,00	97,90

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp 7.682.317.848,00 terealisasi sebesar Rp 7.521.051.255,00 atau 97,90 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,10 % atau Rp 161.266.593,00

Sasaran 4 : Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. Indikator dari sasaran ini adalah Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik.

Jumlah Bangunan Pelayanan public yang berfungsi dengan baik yang di maksud terbagi atas Bangunan Strategis , Gedung Negara dan Gedung Pelayanan Publik yang selesai dibangun dan siap di tempati pada tahun 2020.

Formulasi jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik adalah : Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / Jumlah bangunan pelayanan publik yang dipelihara pertahun selama 5 tahun.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik antara lain :

Tabel 3.36

Program yang mendukung pencapaian target indicator kinerja yang ditetapkan

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	29.143.874.461,00	29.115.699.703,00	99,90
2	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3.218.596.444,00	3.092.747.500,00	96,09
	Total	32.362.470.905,00	32.208.447.203,00	99,52

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 32.362.470.905,00 terealisasi sebesar Rp. 32.208.447.203,00 atau 99,52 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,48 % atau Rp. 154.023.702,00

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pelayanan Publik seperti terlihat pada gambar berikut:



Pembangunan Kantor Pelayanan PEMDA di Tapan Tahun 2020

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Tahun 2020

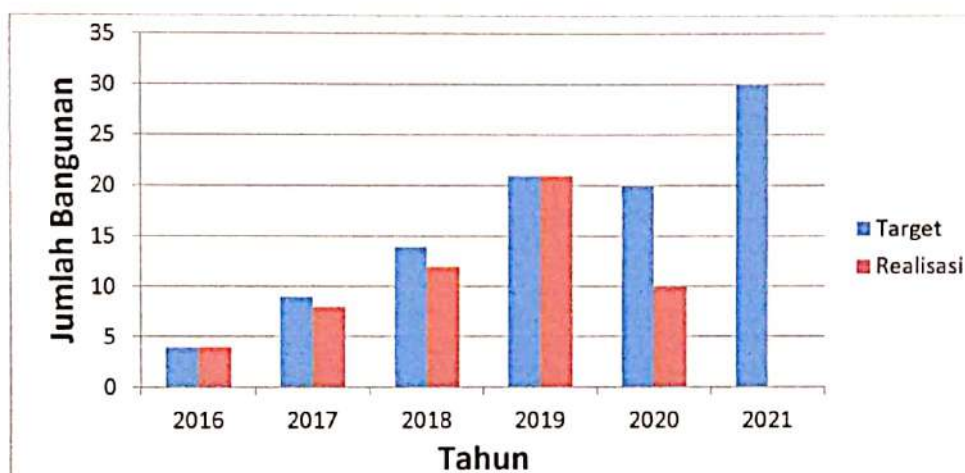
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik.	Unit	20	10	50 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Jumlah Pelayanan Publik berfungsi dengan baik sebagai berikut :

Tabel 3.38 Target dan Realisasi Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (Unit)	4	9	14	21	20	30
2	Realisasi (Unit)	4	8	12	21	10	



Gambar 3.12

Target dan Realisasi Per tahun Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Dengan Baik menurut Renstra Tahun 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Dengan Baik sebagai berikut :

Tabel 3.39

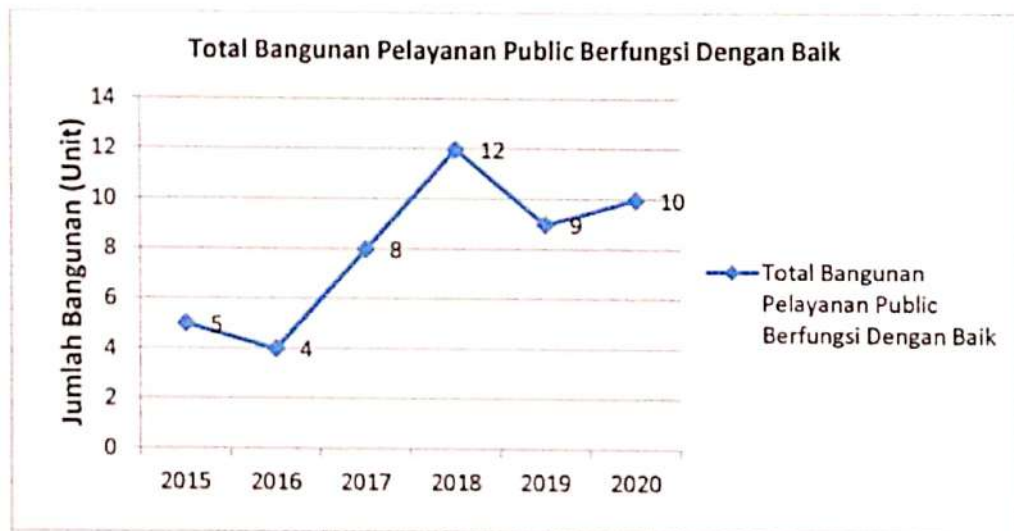
Capaian Kinerja Indikator Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik Tahun 2016 s/d 2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (unit)					Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik	4	8	12	9	10	100	94.52	93.03	100	50

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator *Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik* dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik dan dapat di lihat bahwa jumlah bangunan pelayanan publik dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebanyak 10 Unit pada tahun 2020.

Tabel 3.40
Kenaikan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik (unit)	5	4	8	12	9	10



Gambar 3.13 Kenaikan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik tahun 2015 s/d 2020

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Public adalah :

1. Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti Pembangunan Kantor Pelayanan Pemda di Tapan dan Pembangunan Mesjid Terapung di Painan yang membutuhkan alokasi dana besar. Sehingga perlu dipilah prioritas bangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2020.
2. Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 yakni : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , sasaran ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yakni : Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat.

Tabel 3.41

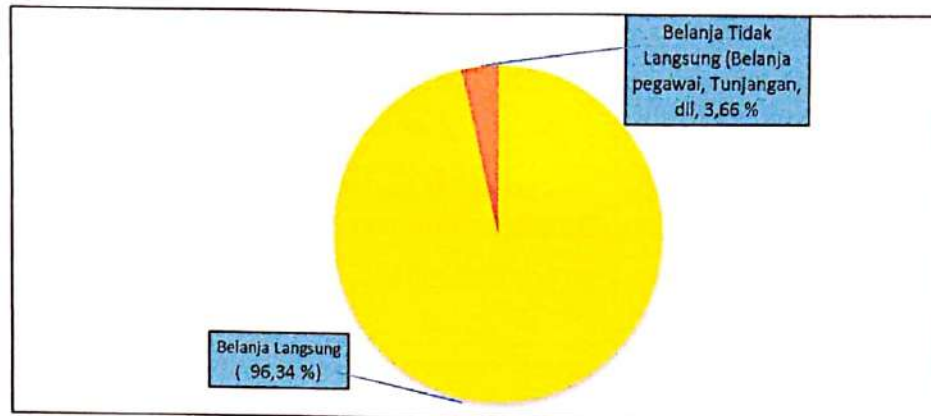
Capaian Kinerja Indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat Tahun 2016 s/d 2019

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2017	2018	2019
1.	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat	A	A	A

Hasil penilaian AKIP Dinas PUTR Tahun 2019 oleh Inspektorat dengan nilai Kategori A(memuaskan).

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 adalah sebesar Rp.144.106.146.277,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.138.830.807.473,00 atau 96,34 % dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.275.338.804,00 atau 3,66 % yang di gunakan untuk belanja pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.



Gambar 3.14 Persentase Belanja Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun Anggaran 2020

Beberapa upaya percepatan dan efisiensi yang dilakukan sepanjang tahun 2020 atas instruksi Dinas sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan anggaran
2. Adanya pengawasan dan control dalam pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan.
3. Telah dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi via email/hp sebagai alat koordinasi.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, tercantum pada table berikut :

Tabel 3.42

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	79.700.443.235,00	77.206.310.371,00	96,87
2	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	17.257.197.273,00	8.549.059.500,00	49,54
3	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	7.682.317.848,00	7.521.051.255,00	97,90
4	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	32.362.470.905,00	32.208.447.203,00	99,52
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.828.378.212,00	1.671.893.163,00	94,28
TOTAL		138.830.807.473,00	127.156.761.492,00	91,59

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020

Dari tabel 3.42 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar Rp 138.830.807.473,00 terealisasi sebesar Rp 127.156.761.492,00 atau 91,59 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 8,41 % atau secara absolut sebesar Rp 11.674.045.981,00
- Sisa anggaran sebesar Rp 11.674.045.981,00 mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dan adanya refocusing anggaran yang dikarenakan dampak Covid – 19 tahun 2020 dan Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 100%, dengan nilai tertinggi adalah 100,15 % yaitu sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar . Sedangkan nilai terendah 50,00 % yaitu sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang dan sasaran meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan public .

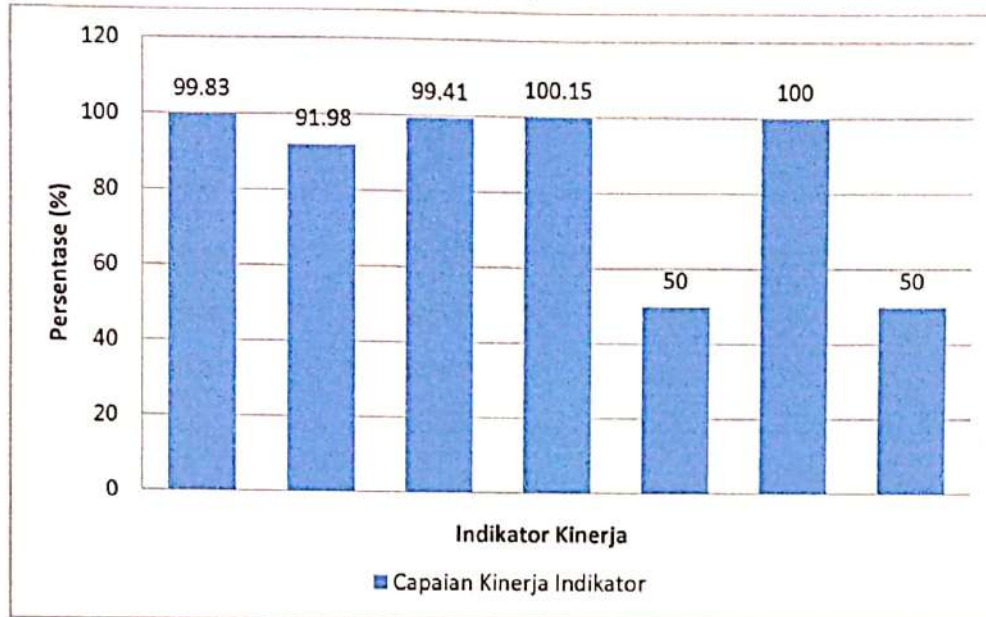
2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja berhasil mencapai target dan melampaui target 1 (satu) indikator. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 85 %, dengan nilai tertinggi adalah 100,15 % yaitu indikator kinerja utama “Persentase akses sanitasi layak”, sedangkan nilai terendah 50 % yaitu indikator kinerja utama Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan dan indikator kinerja utama Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik.

Tabel 3.43 Pencapaian Kinerja Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik.	98.83
		2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.	91.98
2	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Persentase penduduk berakses air minum / bersih.	99.41
		2. Persentase akses sanitasi layak	100.15
3	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1. Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan	50
		2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	100
4	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	50
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat	*

* Hasil Penilaian AKIP tahun 2020 belum ada dari Inspektorat



Gambar 3.15
Capaian Kinerja Indikator

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 127.156.761.492,00 atau 91,59 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 138.830.807.473,00. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik” yaitu 99,52 % dan terendah adalah “Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar” yaitu 49,54 %.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Adanya Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tetapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan
2. Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasisir Selatan perlu penambahan dan peningkatan SDM.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rutin dan berkala dalam rangka evaluasi program dan

kegiatan yang dilaksanakan masing – masing ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

4. Kendala – kendala yang di hadapi pada tahun 2020 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Demikianlah laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ini kami buat dan sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Painan, Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001